

## KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN SORONG

Oktoriance Edowai<sup>1)</sup>, Sofyan Muhamad<sup>2)</sup>, Jusmin<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

E-mail Koresponden: [edowaioktoriance@gmail.com](mailto:edowaioktoriance@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari agenda nasional Asta Cita, serta mengidentifikasi strategi adaptasi yang dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap informan dari unsur pemerintah daerah, dinas terkait, serta pihak sekolah. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong memiliki kesiapan awal yang ditandai oleh dukungan regulasi, pembentukan Satuan Tugas lintas sektor, serta keterlibatan dinas pendidikan dan kesehatan, tetapi implementasi program masih menghadapi keterbatasan anggaran, infrastruktur distribusi, sumber daya manusia teknis, dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah daerah menerapkan strategi adaptasi berupa pelibatan pelaku UMKM lokal, penguatan koordinasi antarinstansi, dan penyesuaian mekanisme distribusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesiapan pemerintah daerah bersifat administratif-koordinatif namun belum sepenuhnya operasional-mandiri, sehingga keberhasilan program sangat bergantung pada penguatan kapasitas kelembagaan dan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah guna mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

**Kata kunci:** Kesiapan Pemerintah Daerah; Implementasi Kebijakan; Makan Bergizi Gratis; Asta Cita; Kabupaten Sorong.

### Abstract

*This research aims to analyze the readiness of the Sorong Regency Local Government in implementing the Free Nutritious Meal Program as part of the national Asta Cita agenda, as well as to identify adaptation strategies undertaken to align the program's implementation with local conditions. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques thru in-depth interviews, field observations, and documentation studies involving informants from local government, relevant departments, and school authorities. Data is analyzed thru the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing using the Miles and Huberman model. The research results indicate that the Sorong Regency Government has initial readiness marked by regulatory support, the formation of a cross-sector Task Force, and the involvement of the education and health departments. However, program implementation still faces budget constraints, distribution infrastructure issues, technical human resource limitations, and difficult geographical conditions. To address these challenges, the local government implemented adaptation strategies such as involving local MSME actors, strengthening inter-agency coordination, and adjusting distribution mechanisms. This study concludes that the readiness of local governments is administrative-coordinative but not yet fully operational-independent, so the success of the program highly depends on strengthening institutional capacity and synchronizing central-regional policies to support the improvement of community nutrition quality toward Golden Indonesia 2045.*

**Key words:** Readiness of the Local Government; Policy Implementation; Free Nutritious Meals; Asta Cita; Sorong Regency.

### Article History:

Received : 2026-04-05

Revised : 2026-05-05

Accepted : 2026-06-30

### PENDAHULUAN

Isu ketahanan pangan dan akses terhadap gizi seimbang menjadi tantangan global yang semakin kompleks pada abad ke-21. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO),

sekitar 2,4 miliar orang di dunia mengalami kerawanan pangan pada tahun 2023 akibat perubahan iklim, konflik, serta ketimpangan ekonomi yang memperburuk akses terhadap pangan bergizi (Alta, 2023). Berbagai negara telah meluncurkan program makan bergizi gratis di sekolah sebagai intervensi sosial untuk menekan angka stunting dan gizi buruk pada anak, seperti National School Lunch Program di Amerika Serikat dan Midday Meal Scheme di India, yang terbukti meningkatkan kehadiran siswa, prestasi belajar, serta status gizi anak dari keluarga berpendapatan rendah (WFP, 2020; WFP, 2013).

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor kesehatan di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan, termasuk di wilayah Kabupaten Sorong. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit dan pemenuhan gizi semakin meningkat, sejalan dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai program kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong (Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, 2025). Permasalahan gizi di Kabupaten Sorong menjadi fokus perhatian pemerintah melalui berbagai program dan intervensi, antara lain pemberian makanan tambahan, pendirian rumah pemulihan gizi, penyuluhan bagi orang tua, serta penguatan peran kader posyandu. Berdasarkan data aplikasi Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Sorong tercatat sebesar 17%, sementara hasil survei nasional menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu 25,1% (Tribun Sorong, 2025). Kesenjangan data tersebut menegaskan urgensi intervensi gizi yang lebih intensif di tingkat daerah.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa anak-anak dengan asupan gizi yang cukup memiliki konsentrasi belajar dan prestasi akademik yang lebih baik, sedangkan kekurangan gizi berpotensi menimbulkan masalah kognitif jangka panjang. Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai intervensi yang berorientasi pada pendidikan inklusif dan berkelanjutan, sekaligus berfungsi menekan angka malnutrisi pada kelompok ekonomi rendah (Qomarrullah et al., 2025).

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong menjadi penting karena wilayah ini merepresentasikan tantangan desentralisasi kebijakan sosial di daerah terpencil. Kesiapan pemerintah daerah dalam aspek infrastruktur, sumber daya manusia, dan tata kelola anggaran menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan program nasional tersebut, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan aktif masyarakat sipil (Herdiana, 2025; Agustini, 2025).

Berdasarkan pengamatan, rendahnya kesadaran gizi di sebagian masyarakat Sorong dipengaruhi oleh budaya konsumsi pangan yang masih bergantung pada karbohidrat dengan asupan protein hewani yang minim, sehingga berdampak pada pola pertumbuhan anak yang kurang optimal. Ketidakmerataan akses gizi turut menciptakan kesenjangan sosial, di mana anak-anak dari keluarga miskin sering mengalami penurunan rasa percaya diri dan prestasi belajar akibat keterbatasan nutrisi. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa program pangan bersubsidi mampu meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga miskin, tetapi belum signifikan meningkatkan kualitas gizi masyarakat (Simbolon & Shylendra, 2022).

Program Makan Bergizi Gratis yang lebih komprehensif masih relatif baru diimplementasikan, dengan tantangan utama terletak pada koordinasi antarlembaga, mekanisme distribusi pangan, dan pengawasan kualitas gizi (Pambudi, 2024). Secara nasional, performa implementasi program ini masih tergolong rendah, dengan hanya 5,6 juta penerima manfaat dan 1.873 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbangun hingga paruh pertama 2025 (Suprpto et al., 2025). Studi pada tingkat lokal di Kawasan Timur Indonesia, khususnya Sorong, masih sangat terbatas, padahal konteks geografis dan sosial daerah ini memengaruhi implementasi kebijakan secara signifikan.

Kesenjangan penelitian terletak pada kurangnya kajian kualitatif yang menelaah bagaimana pemerintah daerah menafsirkan, menyiapkan, dan melaksanakan kebijakan nasional terkait Asta Cita, khususnya Program Makan Bergizi Gratis. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada evaluasi hasil, bukan pada proses implementasi kebijakan dan kapasitas institusional di tingkat daerah, terutama di Kawasan Timur Indonesia seperti Sorong yang konteks geografis dan sosialnya berbeda signifikan dari wilayah barat Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis; dan (2)

bagaimana strategi dan upaya Pemerintah Daerah dalam mengadaptasikan kebijakan tersebut pada tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesiapan pemerintah daerah mencakup aspek sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, dan koordinasi antarinstansi, serta mendeskripsikan strategi adaptasi kebijakan yang dilakukan agar selaras dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat.

## **LITERATURE REVIEW**

### **Kesiapan Pemerintah (*Governance Readiness*)**

pemerintah (*governance readiness*) menggambarkan kapasitas institusional, regulatif, dan administratif suatu pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan publik secara efektif. Clark et al. (1978) menjelaskan bahwa kesiapan pemerintah mencakup dimensi kemampuan perencanaan, pengelolaan sumber daya, dan kesiapan birokrasi untuk mendukung kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Studi terkini menegaskan bahwa kesiapan pemerintah lokal dalam menerapkan kebijakan sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, infrastruktur, dan budaya organisasi yang adaptif (Fitriyani & Salomo, 2024).

Keberhasilan program publik di sektor pangan dan gizi sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial agar kebijakan dapat dijalankan secara efisien dan tepat sasaran (Parsons & Barling, 2022; Ng et al., 2022). Oehmke et al. (2022) menekankan pentingnya indeks kesiapan kebijakan (*policy readiness*) yang mempertimbangkan faktor politik, ekonomi, sosial, dan kelembagaan, sehingga kebijakan pangan bergizi tidak hanya terlaksana secara administratif tetapi juga berkelanjutan secara sosial-ekonomi. Boadu (2024) menambahkan bahwa pemerintah yang siap perlu mengedepankan kolaborasi dan tata kelola terbuka (*open governance*) dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal.

### **Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)**

Teori implementasi kebijakan berfokus pada proses penerjemahan keputusan politik menjadi tindakan nyata di lapangan. Hunga et al. (2023) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh kesiapan organisasi, struktur birokrasi, komunikasi antarunit, serta dukungan sumber daya. Mwangi (2024) menambahkan bahwa keberhasilan implementasi juga bergantung pada kerangka regulasi yang menghubungkan strategi kebijakan dengan realitas sosial, termasuk payung hukum yang kuat dan sistem pengawasan yang transparan.

Edwards III (1980) mengemukakan model implementasi kebijakan yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh interaksi antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model ini telah digunakan secara empiris pada studi implementasi Program MBG di Kabupaten Bondowoso (Sari, 2025), yang menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia lokal, kejelasan mekanisme koordinasi, serta keterbatasan kapasitas pengawasan akibat kendala anggaran dan struktur kelembagaan.

Selain itu, Pelletier et al. (2012) melalui *Mainstreaming Nutrition Initiative* menegaskan bahwa implementasi kebijakan gizi tidak dapat dipahami secara sempit hanya pada tahap pelaksanaan, melainkan mencakup agenda setting, formulasi kebijakan, hingga penguatan kapasitas. Kegagalan implementasi kebijakan gizi di banyak negara berkembang lebih disebabkan oleh lemahnya kapasitas strategis dan manajerial pemerintah dalam menerjemahkan komitmen politik menjadi rencana operasional yang konkret, bukan oleh ketiadaan intervensi yang efektif.

### **Kebijakan Pangan dan Kesejahteraan Sosial (*Food Security Governance*)**

Program Makan Bergizi Gratis termasuk dalam ranah kebijakan kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan. Kerangka FAO (2008) menggarisbawahi empat pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas, yang seluruhnya relevan dalam menilai sejauh mana kebijakan MBG mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Sundari & Yusran, 2025). Candel (2014) menjelaskan bahwa tata kelola pangan mencakup koordinasi lintas sektor yang menghubungkan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan untuk mengurangi ketimpangan sosial.

Agarwala et al. (2022) menegaskan bahwa kebijakan pangan harus mengintegrasikan aspek keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga program makan bergizi tidak hanya berorientasi jangka pendek tetapi juga mendorong kemandirian pangan lokal. Tjilen et al. (2024) menggarisbawahi pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pangan untuk meningkatkan efektivitas dan menjamin keberlanjutan sosial, khususnya dalam konteks daerah dengan kearifan lokal seperti Kabupaten Sorong.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami secara mendalam proses, makna, serta dinamika sosial-kelembagaan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sorong. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena berdasarkan perspektif partisipan, bukan sekadar pengukuran variabel secara kuantitatif, sehingga pendekatan ini relevan untuk menggali bagaimana pemerintah daerah menafsirkan, menyiapkan, dan mengimplementasikan kebijakan Asta Cita Makan Bergizi Gratis di tingkat lokal.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, yang dipilih karena memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang beragam dan merepresentasikan tantangan implementasi kebijakan nasional di daerah terpencil. Penelitian berlangsung selama enam bulan, dari Desember 2025 hingga Mei 2026, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan akhir.

### **Target/Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merujuk pada seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sorong. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif tidak menekankan jumlah populasi, tetapi lebih pada keterlibatan individu yang memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang dikombinasikan dengan snowball sampling untuk memperoleh informan yang relevan. Jumlah informan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan tingkat kejenuhan data (saturasi), diperkirakan berkisar antara 10 hingga 15 orang, terdiri atas Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bapperida, staf bidang gizi, kepala sekolah, serta siswa penerima manfaat di SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder untuk memperoleh informasi yang mendalam serta meningkatkan validitas hasil penelitian melalui triangulasi data. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan secara semi terstruktur, observasi lapangan terhadap pelaksanaan distribusi makanan di sekolah dan kantor pemerintahan, serta dokumentasi peristiwa berupa rekaman wawancara dan foto kegiatan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi atas peraturan, laporan pelaksanaan, data statistik/profil daerah, dan publikasi akademik yang relevan dengan Program Makan Bergizi Gratis dan Asta Cita.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga penyusunan laporan, mengikuti model Miles dan Huberman (1994) yang mencakup tiga tahapan utama.

1. Reduksi data, yaitu proses menyaring, mengelompokkan, dan menyederhanakan data mentah berdasarkan tema dan indikator kesiapan pemerintah (kebijakan, kelembagaan, SDM, anggaran, sarana, dan sistem pelaksanaan).
2. Penyajian data dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan bagan untuk memudahkan identifikasi pola dan keterkaitan antaraspek.
3. Penarikan dan verifikasi kesimpulan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, guna memastikan bahwa temuan penelitian bersifat kredibel, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis**

Kabupaten Sorong merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Papua Barat Daya yang memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan di kawasan Timur Indonesia. Secara astronomis, Kabupaten Sorong terletak antara 00°33'42" Lintang Utara dan 01°35'29" Lintang Selatan, serta 130°40'49" Bujur Timur. Kondisi geografis wilayah ini berimplikasi langsung terhadap penyediaan dan pemerataan layanan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat (Ningrum, 2024).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan secara resmi oleh Pemerintah pada tanggal 6 Januari 2025 sebagai program prioritas nasional dalam kerangka Asta Cita ke-4 yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia Indonesia. Di Kabupaten Sorong, Program MBG mulai berjalan pada awal tahun 2025 dengan jangkauan yang masih terbatas pada beberapa sekolah di wilayah yang relatif mudah diakses. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (2025), program ini telah menjangkau 10.249 penerima manfaat, terdiri dari 9.839 peserta didik dan 410 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan cakupan layanan pada 49 sekolah dan 2 posyandu.

Kesiapan Pemerintah Daerah dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam menyiapkan seluruh aspek yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, maupun koordinasi antarinstansi agar tujuan program dapat tercapai secara efektif. Fauzia et al. (2026) menjelaskan bahwa kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi Makan Bergizi Gratis tercermin melalui kemampuan membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kesiapan sumber daya, serta kapasitas kelembagaan dalam menjalankan kebijakan publik di tingkat lokal. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Sorong secara umum menunjukkan kesiapan awal, meskipun masih terdapat sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaannya, yang dapat dijabarkan melalui empat aspek berikut.

#### **Kesiapan Regulasi dan Kelembagaan**

Kesiapan regulasi dan kelembagaan merupakan aspek mendasar dalam menentukan keberhasilan implementasi Program MBG di Kabupaten Sorong. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, kesiapan kelembagaan tidak hanya dilihat dari keberadaan aturan formal, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah membangun koordinasi lintas sektor, membentuk struktur pelaksana, serta mengintegrasikan program ke dalam dokumen perencanaan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong telah membangun fondasi kesiapan struktural dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati dan melibatkan unsur TNI/Polri serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Bapperida.

Pembentukan Satgas tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antarinstansi, memperjelas pembagian tugas, serta memastikan program berjalan secara terintegrasi mengingat pelaksanaan MBG melibatkan banyak sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, pangan, hingga pengawasan distribusi. Pada fase awal, koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sempat terkendala oleh tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan pembagian peran, namun kondisi tersebut berangsur membaik setelah Dinas Pendidikan diposisikan sebagai motor utama validasi data peserta didik dan Dinas Kesehatan difokuskan pada pengawasan mutu pangan.

Keterlibatan Wakil Bupati sebagai ketua Satgas menandakan adanya dukungan politik dari level tertinggi pemerintah lokal, yang menurut Edwards III (1980) merupakan salah satu faktor disposisi yang sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Selain pembentukan Satgas, kesiapan regulasi daerah juga tercermin dari mulai diarahkannya penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar mengintegrasikan Program MBG sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah, sejalan

dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan pemerintah daerah menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Secara konseptual, Grindle (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh konteks implementasi, termasuk dukungan institusi dan kesesuaian kebijakan dengan kondisi daerah, sehingga integrasi program ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi langkah penting untuk memperkuat legitimasi dan arah implementasi Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa kesiapan regulasi dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sorong berada pada kondisi cukup siap secara struktural dan koordinatif, meskipun kesiapan tersebut masih lebih bersifat administratif dan responsif terhadap arahan pusat, ketimbang inisiatif kebijakan yang dirancang secara mandiri oleh daerah.

#### **Kesiapan Sumber Daya Manusia**

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis, mengingat pelaksanaan program membutuhkan tenaga yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan, gizi, administrasi, serta koordinasi teknis lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran SDM pemerintah daerah lebih banyak bersifat fasilitatif dan koordinatif, sedangkan pelaksanaan teknis utama, termasuk pengelolaan dapur dan penyediaan tenaga ahli gizi, berada di bawah kendali penuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan unit teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong berperan penting dalam pengawasan kualitas gizi, kesehatan penerima manfaat, dan edukasi pola makan sehat, namun perannya bersifat pendampingan teknis, bukan pengelolaan langsung. Demikian pula, Dinas Pendidikan berkontribusi melalui penyediaan dan validasi data siswa yang dibutuhkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam perencanaan distribusi maupun pembangunan dapur baru. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat kebijakan yang secara normatif mengharuskan keterlibatan penuh pemerintah daerah dan realitas kapasitas teknis Sumber Daya Manusia lokal yang sebenarnya terjadi di lapangan, sebagaimana dijelaskan dalam konsep implementation gap, yaitu jurang antara desain kebijakan yang ideal dan kemampuan aktual aktor daerah dalam mengimplementasikannya (Pressman & Wildavsky, dalam Edwards III, 1980).

Temuan ini memperlihatkan bahwa ketergantungan terhadap Sumber Daya Manusia pusat (SPPG/BGN) bukan sekadar persoalan kompetensi teknis semata, melainkan konsekuensi dari desain program yang secara sistematis membatasi otonomi daerah dalam mengelola program sosial strategis. Sejalan dengan hal tersebut, Hunga et al. (2023) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kesiapan organisasi, struktur birokrasi, dan dukungan sumber daya manusia yang memadai di tingkat pelaksana, sehingga keterbatasan kewenangan teknis daerah berpotensi menghambat respons cepat terhadap permasalahan lapangan.

#### **Kesiapan Anggaran dan Pendanaan**

Kesiapan anggaran dan pendanaan menjadi aspek krusial dalam keberlanjutan Program MBG di Kabupaten Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pendanaan utama program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Badan Gizi Nasional langsung kepada SPPG sebagai pelaksana teknis di lapangan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong tidak mengeluarkan anggaran daerah secara langsung untuk operasional program, dan perannya lebih bersifat mendukung koordinasi, fasilitasi, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan.

Kondisi tersebut dikonfirmasi secara konsisten oleh informan dari Bapperida dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, yang menjelaskan bahwa seluruh dana operasional Makan Bergizi Gratis bersumber langsung dari pemerintah pusat tanpa melibatkan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara teoretik, kondisi ini mencerminkan fenomena yang dalam literatur desentralisasi fiskal disebut sebagai vertical fiscal imbalance, yaitu ketidakseimbangan antara kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah dan kapasitas fiskal yang tersedia untuk mendukungnya (Mwangi, 2024). Temuan ini berbeda dengan pandangan ideal desentralisasi fiskal yang seharusnya memberikan ruang lebih luas bagi

pemerintah daerah untuk mengelola program sosial berdasarkan kebutuhan dan karakteristik lokal (Candel, 2014; Food and Agriculture Organization, 2008).

Pada implementasi Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong, bentuk desentralisasi yang terjadi lebih bersifat administratif, sementara kewenangan fiskal tetap berada di tingkat pusat. Akibatnya, Pemerintah Daerah cenderung berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan pusat dan belum sepenuhnya menjadi aktor strategis yang dapat menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Sorong tetap memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan data, koordinasi lintas sektor, dan dukungan sarana, yang menunjukkan adanya tanggung jawab daerah dalam memastikan kelancaran program meskipun sumber anggaran utama berasal dari pemerintah pusat (Badan Gizi Nasional, 2024).

#### **Kesiapan Infrastruktur dan Sarana Pendukung**

Kesiapan infrastruktur dan sarana pendukung menjadi salah satu aspek penting dalam implementasi Program MBG di Kabupaten Sorong. Pemerintah daerah bersama pelaksana program telah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung, seperti dapur SPPG, tempat penyimpanan makanan sementara di sekolah, serta sarana distribusi ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dilakukan dengan menyesuaikan kondisi geografis wilayah, termasuk inisiatif penempatan dapur di lingkungan sekolah pada wilayah pedalaman seperti Klamono, agar makanan tetap dalam kondisi segar saat disajikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana pendukung program masih menghadapi keterbatasan yang signifikan, terutama pada armada distribusi makanan. Keterlambatan distribusi sering terjadi akibat terbatasnya jumlah kendaraan pengangkut dibandingkan dengan jumlah sekolah yang harus dilayani serta jarak antarsekolah yang relatif jauh. Kondisi geografis Kabupaten Sorong yang kompleks, dengan kombinasi wilayah pesisir, dataran rendah, dan pedalaman, menjadi faktor utama penghambat pemerataan layanan distribusi makanan.

Permasalahan infrastruktur tersebut dapat dipetakan ke dalam dua lapisan yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu permasalahan teknis sanitasi dan keamanan pangan pada level mikro, seperti sterilisasi alat makan dan penanganan alergi siswa, serta permasalahan aksesibilitas geografis pada level makro, seperti jarak tempuh dan minimnya armada pengantaran. Keterlambatan distribusi yang menyebabkan makanan diterima setelah jam belajar berakhir berdampak langsung pada efektivitas program dalam mendukung konsentrasi belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

Efektivitas distribusi juga sangat dipengaruhi oleh jumlah dan persebaran dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang masih terbatas menyebabkan cakupan layanan menjadi terlalu luas untuk satu titik produksi, sehingga jarak tempuh distribusi menjadi lebih panjang dan berpotensi menurunkan kualitas makanan dari aspek kesegaran dan keamanan pangan. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (2025), implementasi Program MBG di Kabupaten Sorong telah menjangkau 10.249 penerima manfaat yang terdiri atas 9.839 peserta didik serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan cakupan layanan pada 49 sekolah dan dua posyandu, didukung oleh beberapa SPPG yang tersebar di wilayah Sorong Klamasen, Sorong Mariat, Sorong Malaweale, dan Sorong Klasuluk. Selain itu, terdapat 25 lokasi pembangunan SPPG di wilayah terpencil yang sedang diproses untuk memperluas jangkauan layanan, yang mengindikasikan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program saat ini, tetapi juga berupaya memperkuat infrastruktur pendukung jangka panjang (Badan Gizi Nasional, 2025).

#### **Strategi dan Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Tingkat Lokal**

##### **Implementasi Program Makan Bergizi Gratis**

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong dilakukan melalui mekanisme distribusi makanan dari dapur SPPG menuju sekolah-sekolah penerima manfaat. Makanan dipersiapkan terlebih dahulu di dapur SPPG sebelum diantar sesuai jadwal yang ditentukan, kemudian pihak sekolah melakukan penyimpanan sementara sebelum makanan

dibagikan kepada siswa secara bertahap per kelas agar pembagian berjalan tertib dan merata. Pelaksanaan program melibatkan koordinasi antara sekolah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan SPPG sebagai pelaksana teknis penyediaan makanan, di mana pihak sekolah berperan membantu pembagian makanan dan pengawasan siswa selama program berlangsung (Badan Gizi Nasional, 2024).

Ketepatan sasaran penerima manfaat menjadi bagian penting dalam implementasi program. Penentuan sasaran dilakukan melalui pendataan siswa oleh Dinas Pendidikan dan pemetaan sekolah penerima manfaat berdasarkan kondisi wilayah dan jumlah peserta didik, dengan perhatian khusus pada sekolah di wilayah pedalaman yang menghadapi keterbatasan akses distribusi. Penyediaan data pendidikan yang akurat menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program pelayanan dasar, termasuk program intervensi gizi berbasis sekolah, agar bantuan yang diberikan tepat sasaran (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2024).

Pada aspek kualitas dan standar gizi makanan, penyusunan menu dilakukan oleh tenaga ahli gizi di bawah pengelolaan SPPG dan BGN, dengan pengawasan kualitas melalui mekanisme quality control serta pemeriksaan sampel makanan apabila ditemukan masalah kesehatan setelah konsumsi. Sampel makanan disimpan selama 2 x 24 jam sebagai langkah mitigasi risiko bagi penerima manfaat. Pengawasan keamanan pangan dan standar gizi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program intervensi gizi berbasis sekolah untuk mencegah risiko gangguan kesehatan pada peserta didik (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Dalam menghadapi berbagai keterbatasan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong menerapkan strategi koordinatif dan fasilitatif sebagai pendekatan utama, di mana pemerintah daerah berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat, sekolah, dan masyarakat melalui Satgas MBG. Strategi ini sejalan dengan konsep open governance yang dikemukakan oleh Boadu (2024), yaitu model pemerintahan yang menekankan keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Strategi adaptasi yang paling menonjol terlihat pada upaya pemerintah daerah menghadapi tantangan geografis melalui inisiatif pembangunan dapur SPPG di wilayah pedalaman yang ditempatkan di lingkungan sekolah, sebagaimana di Klamono, guna mendekatkan lokasi produksi dengan penerima manfaat dan mengurangi risiko keterlambatan distribusi.

Pemerintah Daerah juga berupaya mendorong keterlibatan pelaku UMKM, petani, dan nelayan lokal dalam rantai pasok program, meskipun pelaksanaannya di lapangan belum berjalan optimal dan masih bersifat aspiratif. Upaya tersebut menggambarkan adanya orientasi kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, tetapi pada saat yang sama memperlihatkan kompleksitas dalam membangun sistem rantai pasok pangan lokal yang berkelanjutan, yang membutuhkan dukungan infrastruktur distribusi, sistem logistik yang memadai, dan peningkatan kapasitas produksi masyarakat lokal. Secara keseluruhan, strategi implementasi yang diterapkan pemerintah daerah masih cenderung bersifat reaktif terhadap masalah yang muncul di lapangan, belum sepenuhnya berbasis pada sistem manajemen yang terintegrasi dan terencana secara sistematis.

#### **Dampak Sosial-Ekonomi dan Potensi Pemberdayaan Masyarakat Lokal**

Meskipun implementasi Program MBG di Kabupaten Sorong masih menghadapi berbagai hambatan operasional, penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa program telah memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh penerima manfaat, baik pada aspek gizi, pendidikan, maupun ekonomi keluarga. Dari perspektif pendidikan, program berkontribusi pada peningkatan motivasi belajar dan kehadiran siswa, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang sebelumnya tidak terbiasa membawa bekal atau uang jajan dari rumah.

Temuan ini sejalan dengan kerangka FAO (2008) mengenai pilar pemanfaatan (utilisation) pangan, yang menegaskan bahwa ketercukupan gizi secara langsung memengaruhi kapasitas kognitif dan produktivitas individu, sehingga siswa yang menerima nutrisi yang cukup menunjukkan peningkatan konsentrasi belajar dan tingkat ketidakhadiran yang lebih rendah. Dari perspektif ekonomi rumah tangga, program ini berkontribusi positif dalam menurunkan beban pengeluaran keluarga, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan konsumsi anak selama berada di lingkungan sekolah, sehingga uang jajan yang sebelumnya dikeluarkan dapat dialihkan untuk kebutuhan lain seperti biaya transportasi.

Dampak tersebut relevan dengan konsep aksesibilitas dalam kerangka ketahanan pangan FAO (2008), yang menekankan pentingnya keterjangkauan pangan bergizi bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dalam konteks ini, Program MBG berperan signifikan dalam memperluas akses terhadap pangan bergizi bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi di Kabupaten Sorong. Pada aspek pemberdayaan ekonomi lokal, potensi keterlibatan petani, nelayan, dan UMKM dalam rantai pasok program masih menjadi peluang yang belum tergarap secara optimal. Apabila ekosistem pangan lokal dapat diintegrasikan secara terstruktur ke dalam rantai pasok Makan Bergizi Gratis, program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi daerah yang mendukung kemandirian pangan dan menciptakan efek pengganda ekonomi (*multiplier effect*) bagi masyarakat Kabupaten Sorong.

Temuan penelitian ini mengindikasikan adanya paradoks desentralisasi yang dapat diistilahkan sebagai desentralisasi semu. Ketika pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional memonopoli pengelolaan anggaran dan otoritas penunjukan tenaga ahli di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, ruang bagi Pemerintah Daerah untuk berinovasi berbasis kearifan lokal menjadi terbatas. Kondisi ini menempatkan Pemerintah Kabupaten Sorong pada posisi yang menanggung beban tanggung jawab moral di mata masyarakat tanpa dibekali instrumen kekuasaan keuangan dan teknis yang memadai untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Jika dikontekstualisasikan dengan teori kesiapan pemerintah (*governance readiness*), kondisi di Kabupaten Sorong menunjukkan ketimpangan antara kesiapan regulatif-politik dan kesiapan manajerial-operasional. Secara regulatif, pemerintah daerah dinilai cukup siap karena mampu merespons instruksi pusat dengan cepat melalui pembentukan Satgas dan penyelarasan dokumen perencanaan daerah. Namun, daerah ini belum sepenuhnya siap secara mandiri karena tidak memiliki kendali penuh atas aspek finansial dan pengelolaan teknis gizi yang dimonopoli oleh institusi vertikal pusat.

Mengacu pada teori implementasi kebijakan Edwards III (1980), faktor disposisi kepemimpinan di Kabupaten Sorong sangat mendukung keberhasilan program melalui keterlibatan aktif Wakil Bupati, dan komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah telah berjalan cukup lancar. Akan tetapi, implementasi kebijakan ini terbentur pada pembagian sumber daya (*resources*) yang tidak merata, khususnya keterbatasan armada logistik yang menggagalkan ketepatan waktu distribusi makanan. Persoalan ini sejalan dengan spektrum kebijakan gizi dari Pelletier et al. (2012), yang menegaskan bahwa kegagalan program gizi di negara berkembang lebih banyak disebabkan oleh lemahnya kapasitas manajerial dalam menerjemahkan komitmen politik menjadi aksi logistik yang konkret, bukan oleh rancangan menu gizi itu sendiri.

Dari perspektif kerangka FAO (2008), Program MBG di Sorong baru mampu menyentuh pilar ketersediaan (*availability*) pangan melalui pembangunan dapur komunal, tetapi masih rapuh pada pilar aksesibilitas dan stabilitas akibat buruknya konektivitas jalan dan minimnya moda transportasi di wilayah Papua Barat Daya. Inisiatif pemerintah daerah dalam mendekatkan lokasi dapur ke sekolah-sekolah pedalaman merupakan upaya nyata untuk menyelamatkan pilar aksesibilitas fisik agar pemenuhan gizi anak sekolah dapat berjalan secara berkelanjutan.

Temuan ini memperkuat sejumlah kajian terdahulu. Hasil analisis di lapangan sejalan dengan studi Roeslie dan Bachtiar (2018) serta Sahroji dan Hidayat (2022), yang menegaskan bahwa kesiapan fasilitas dan kompetensi tenaga pelaksana merupakan pilar utama penentu keberhasilan kebijakan kesehatan masyarakat. Demikian pula, dinamika di Kabupaten Sorong mendukung temuan Febryanti et al. (2025) mengenai pentingnya sinergi proporsional antara kesiapan pemerintah daerah, pihak sekolah, dan partisipasi masyarakat sipil. Di sisi lain, potret hambatan di wilayah ini mengonfirmasi temuan Leki dan Hardianto (2024) di Kabupaten Belu serta Wuisan et al. (2025) di Kabupaten Mappi, Papua Selatan, yang menyimpulkan bahwa keterbatasan infrastruktur dasar, ketergantungan finansial pada dana transfer pusat, dan kondisi geografis ekstrem merupakan hambatan utama pelaksanaan program nasional di wilayah terpencil. Karakteristik daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) menuntut pendekatan logistik dan kebijakan yang berbeda dari standar wilayah urban.

Sementara itu, penelitian ini juga menemukan unsur kebaruan apabila dibandingkan dengan riset di wilayah barat Indonesia, seperti studi Febryanti et al. (2025) di Malang atau Rosidin dan Maulana (2025) di Banten, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah di wilayah tersebut memiliki ruang diskresi yang lebih luas untuk mengintegrasikan pelaku usaha lokal. Sebaliknya, di Kabupaten Sorong terjadi apa yang dapat disebut sebagai asimetri kelembagaan baru, di mana desain kebijakan Makan Bergizi Gratis kontemporer secara sistematis membatasi otonomi daerah dan memosisikan pemerintah daerah sebatas validator data administratif. Kebaruan ilmiah penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan top-down yang terlalu kaku dari Badan Gizi Nasional berisiko membatasi inisiatif lokal di wilayah Papua. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis mengenai bagaimana relasi kuasa pusat-daerah dalam struktur birokrasi vertikal dapat memengaruhi efektivitas distribusi logistik pangan di wilayah dengan karakteristik geografis kepulauan dan pedalaman, yang relatif belum banyak dikaji dalam literatur kebijakan publik dan ketahanan pangan sebelumnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesiapan Pemerintah Daerah dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong telah menunjukkan kesiapan pada aspek administratif dan koordinatif, yang ditandai dengan pembentukan Satgas Makan Bergizi Gratis, keterlibatan berbagai Organisasi Perangkat Daerah, serta integrasi program ke dalam dokumen perencanaan daerah. Namun, kesiapan tersebut masih berada pada tahap administratif dan belum sepenuhnya mencapai kesiapan operasional yang mandiri, karena pelaksanaan program masih sangat bergantung pada kebijakan teknis, pendanaan, dan arahan pemerintah pusat.

Pada aspek pendanaan dan kelembagaan, tingginya ketergantungan terhadap pendanaan pemerintah pusat menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum mampu mendukung keberlanjutan program secara mandiri. Pemerintah Daerah menerapkan strategi adaptasi melalui pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang lebih dekat dengan lokasi penerima manfaat di wilayah pedalaman, serta mendorong integrasi petani, nelayan, dan UMKM lokal ke dalam rantai pasok program sebagai upaya memperkuat ekosistem pangan lokal sekaligus menciptakan efek pengganda ekonomi (multiplier effect).

Program Makan Bergizi Gratis yang telah berjalan menunjukkan dampak positif bagi penerima manfaat, antara lain peningkatan motivasi belajar, peningkatan kehadiran peserta didik, dan pengurangan beban pengeluaran keluarga. Meskipun demikian, implementasi program masih menghadapi sejumlah hambatan struktural, fiskal, geografis, dan infrastruktur, termasuk keterbatasan armada distribusi serta belum meratanya ketersediaan dapur dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Secara keseluruhan, kesiapan Pemerintah Kabupaten Sorong lebih dominan pada aspek administratif dibandingkan aspek operasional, sehingga diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, kemandirian pendanaan daerah, dan sistem distribusi agar implementasi program dapat berjalan optimal dan merata.

### **Saran**

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sorong perlu meningkatkan kesiapan implementasi MBG dari sekadar kesiapan administratif menuju kesiapan operasional yang lebih komprehensif, terutama pada aspek distribusi, logistik, dan pemetaan kebutuhan infrastruktur.
2. Kedua, perlu disusun Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan MBG guna memberikan kepastian kelembagaan dan dasar hukum pengalokasian sumber daya daerah.
3. Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional perlu mengevaluasi jumlah, lokasi, dan beban kerja setiap dapur dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi agar distribusi makanan dapat berlangsung lebih tepat waktu dan efisien.
4. Dinas Kesehatan perlu berperan lebih aktif melalui pendampingan dan pemantauan berkala terhadap standar gizi, keamanan pangan, dan sanitasi dapur.

5. Pemerintah Daerah perlu mendorong keterlibatan petani, nelayan, dan UMKM lokal secara lebih terstruktur dalam rantai pasok program untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan keberlanjutan program jangka panjang.
6. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas Program Makan Bergizi Gratis secara lebih mendalam melalui pengukuran dampak terhadap status gizi, prestasi belajar, dan ketahanan pangan rumah tangga, serta melakukan penelitian komparatif antardaerah di Kawasan Timur Indonesia untuk memperoleh model implementasi yang paling sesuai dengan karakteristik wilayah terpencil dan kepulauan.

## Reference

### Books

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.

### Website

- Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong. (2025, 16 April). Menyikapi isu kesehatan terbaru. <https://bppauidikmas-bali.id/2025/04/dinas-kesehatan-kabupaten-sorong-menyikapi-isu-kesehatan-terbaru/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Makan bergizi gratis di Sulawesi Tenggara: Membaca data penerima dan tantangan perlindungan gizi anak. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kendari/id/data-publikasi/artikel/2916>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Pedoman pengawasan keamanan pangan dan gizi pada program intervensi gizi berbasis sekolah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2024). Pedoman pendataan peserta didik untuk mendukung program pelayanan dasar pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
- Liputan6.com. (2025, 4 Januari). Wujudkan langkah nyata menuju generasi emas Indonesia 2045, program makan bergizi gratis siap dimulai. <https://www.liputan6.com/news/read/5864550>
- Tribun Sorong. (2025, 13 Juli). Angka stunting di Kabupaten Sorong turun jadi 17 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional. Tribunnews. <https://sorong.tribunnews.com/2025/07/13/angka-stunting-di-kabupaten-sorong-turun-jadi-17-persen-lebih-rendah-dari-rata-rata-nasional>

### Journals

- Agarwala, C., Jemaneh, J., & Yusuf, Y. (2022). Government policies and sustainable food systems: Navigating challenges, seizing opportunities, and advancing environmental and social resilience. *Law and Economics Journal*.
- Agustini, U. (2025). Efektivitas dan tantangan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362–370.
- Alta, A., Auliya, R., & Fauzi, A. N. (2023). Policy Barriers to a Healthier Diet: The Case of Trade and Agriculture. Center for Indonesian Policy Studies.
- Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 3(1), 47-54.
- Andriyan, Y. (2025). Analisis Dasar Green Government Pada Pemerintah Kabupaten Sorong: Kesiapan Daerah Menuju Tata Kelola Hijau. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 5(2), 443-449.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Pamungkas, A. C., Muhamad, S., & Rahakratat, R. (2024). Transformasi E-Government Menuju Good Governance di Pemerintah Kabupaten Sorong. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 24-35.
- Badan Gizi Nasional. (2024). Pedoman pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia.

- Badan Gizi Nasional. (2025). Laporan capaian Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Sorong tahun 2025. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia.
- Boadu, E. S. (2024). Evaluating Ghana's youth-centered food-security policies: A collaborative governance approach. *Sustainability*.
- Candel, J. J. L. (2014). Food security governance: A systematic literature review. *Food Security*, 6(4), 585–601.
- Clark, J. K., Freedgood, J., Irish, A., & Hodgson, K. (1978). Fail to include, plan to exclude: Reflections on local governments' readiness for building equitable community food systems. *JSTOR*.
- Fauzia, M. E., Halimah, Z. N., & Hapsari, Y. I. (2026). Analisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *JISIP UNJA*, 10(1), 1–12.
- Febryanti, I., Indiaty, I., & Pane, M. A. (2025). Implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis. *Dialogue: Jurnal Ilmu Sosial*.
- Fitriyani, A. D., & Salomo, R. V. (2024). The readiness of local governments in Indonesia in implementing talent management policies: An Organisational Readiness for Implementing Change (ORIC) approach. *Journal of Public Policy and Social Research*, 5(3), 1–15.
- Food and Agriculture Organization. (2008). An introduction to the basic concepts of food security. *FAO*.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Herdiana, D. (2025). Implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor pendorong dan penghambat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 470–478.
- Hunga, H. G., Chiwaula, L., & Katundu, M. (2023). Organizational readiness for policy implementation: An assessment of the harmonized seed regulations in Malawi. *ScienceDirect*.
- Leki, D. F., Hardianto, W. T., & Suprojo, A. (2024). Implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait upaya penanganan stunting (Studi kasus di Kecamatan Lasialat, Kabupaten Belu). *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 92–100.
- Mwangi, A. K. (2024). Exploring the role of regulatory frameworks in bridging policy implementation strategies and addressing food insecurity in Kenya: A case of Murang'a County. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 5(4), 4132–4136.
- Muhamad, S. (2026). The Involvement of the Papuan People's Assembly in the Democratic Process: A Study of the 2024 Southwest Papua Gubernatorial Election. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 21(1), 86–94.
- Ng, S. H., Yeatman, H., Kelly, B., Sankaranarayanan, S., & Karupaiah, T. (2022). Identifying barriers and facilitators in the development and implementation of government-led food environment policies: A systematic review. *Nutrition Reviews*, 80(8), 1896–1918.
- Ningrum, D. (2024). Kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah tertinggal di Papua Barat Daya. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 3(1), 22–35.
- Oehmke, J. F., Young, S. L., Heinemann, A. W., & Rukuni, M. (2022). A novel measure of developing countries' agricultural and food policy readiness. *World Development*, 152, 105782.
- Pambudi, A. W. (2024). Indonesia government's efforts to eradicate stunting through the free nutritious meal program for children: Opportunities and challenges. *Politikom Indonesiana*.
- Pamungkas, A. C., Andriyan, Y., Rumlus, M. H., & Kalauw, S. M. (2025). Globalisasi dan Desentralisasi dalam Permasalahan Pembangunan di Papua Barat Daya. *JOSH: Journal of Sharia*, 4(02), 1–20.
- Parsons, K., & Barling, D. (2022). England's food policy coordination and the Covid-19 response. *Food Security*, 14(5), 1027–1043.
- Pelletier, D. L., Frongillo, E. A., Gervais, S., Hoey, L., Menon, P., Ngo, T., Stoltzfus, R. J., & Ahmed, A. M. (2012). Nutrition agenda setting, policy formulation and implementation: Lessons from the Mainstreaming Nutrition Initiative. *Health Policy and Planning*, 27(1), 19–31.
- Qomarrullah, R., Suratni, S., Wulandari, L., & Sawir, M. (2025). Dampak jangka panjang program makan bergizi gratis terhadap kesehatan dan keberlanjutan pendidikan.

Indonesian Journal of Intellectual Publication, 5(2), 130–137.

- Rahakratat, R., & Andriyan, Y. (2025). Peran Majelis Rakyat Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Di Papua Barat Daya Tahun 2024. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 5(3), 469-477.
- Roeslie, E., & Bachtiar, A. (2018). Analisis persiapan implementasi Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 7(3), 101–108.
- Rosidin, A., & Maulana, J. (2025). Tantangan dan strategi implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Banten. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 6(1), 45–58.
- Sahroji, Q. N., & Hidayat, R. (2022). Implementasi kebijakan Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan*, 8(2), 77–89.
- Sari, S. M. (2025). Implementation of the free nutritious meal policy in Bondowoso Regency. *Journal Publicuho*, 8(3), 1898–1907.
- Simbolon, R. S., & Shylendra, F. (2022). Enhancing food security and alleviating poverty: Community responses to the poor rice program in Jaranguda Village, Indonesia. *Law and Economics Journal*.
- Sundari, A. R., & Yusran, R. (2025). Evaluating food security policy implementation: An adaptive governance approach with educational implications. *Indonesian Journal of Education and Social Studies*, 4(3), 290–301.
- Suprpto, F. A., Praditya, E., Dewi, R. M., & Adiyoso, W. (2025). A policy implementation review of the Free Nutritious Meal (MBG) Program. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 1–14.
- Tjilen, A. P., Tambaip, B., & Dharmawan, B. (2024). Engaging stakeholders in policy decision-making for food security governance: Identification, perception, and contribution. *Jurnal Tata Kelola Pangan*, 2(1), 1–12.
- Wuisan, V. Z., Jaya, A., Sirante, Y., & Lambe, G. Z. (2025). Analisis kebijakan kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Mappi Papua Selatan terhadap program makan bergizi gratis. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 5603–5608.
- World Food Programme (2020). State of school Feeding Worldwide 2020. Rome: WFP
- World Food Programme (WFP). (2013). State of school Feeding Worldwide 2013. Rome: WFP.